

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan teori

a. Kinerja

Menurut Wibowo (dalam Mustafa, Abdul Talib, 2017 : 139), dalam perspekti teori, kinerja dapat dipandang sebagai proses maupun hasil pekerjaan. Kinerja merupakan suatu proses tentang bagaimana pekerjaan berlangsung untuk mencapai hasil kerja. Namun hasil pekerjaan itu sendiri juga menunjukkan kinerja. Ini di dalamnya pelayanan publik menunjuk pada dua hal yaitu berkaitan dengan bagaimana sesuatu itu dilakukan dan yang kedua yakni seperti apa hasil dari suatu yang dilakukan.

Kinerja menurut Sinambela (2010:136) berasal dari pengertian “*Performance*” yang memberikan pengertian sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang dihasilkan. Sinambela (2010:137) menyatakan bahwa “ Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing – masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika”.

Withmore (dalam Sinambela, 2010:138) mengemukakan kinerja merupakan ekspresi potensi seseorang dalam memenuhi tanggung

jawabnya dengan menetapkan standar tertentu. Untuk meningkatkan kinerja yang optimum perlu ditetapkan standar yang jelas, yang dapat menjadi acuan bagi seluruh pegawai. Kinerja pegawai akan tercipta jika pegawai dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dikemukakan arti kinerja sebagai “(1) sesuatu yang dicapai; (2) prestasi yang diperlihatkan; (3) kemampuan kerja”. Menurut Cascio dalam buku (Rahadi, Dedi Rianto, 2010 : 2), *Performance appraisal is the systematic description of individual or group job relevant strengths and weakness. Although technical problem (e.g. the choice of format) and human problems (e.g. supervisory resistance, interpersonal barriers) both plaque performance appraisal, they are not insurmountable.* Inti dari kutipan tersebut adalah penilaian kinerja merupakan suatu gambaran yang sistematis tentang kebaikan dan kelemahan dari pekerjaan individu atau kelompok.

Ada beberapa teori dalam pembahasan kinerja diantaranya menggunakan tipologi kinerja berdasarkan dimensi prestasi aksi dan prestasi hasil menurut Melvin J. Dubnick yaitu sebagai berikut :

1. Kinerja P1 (Produksi), yakni kinerja yang fokus pada kualitas prestasi aksi dan prestasi hasil yang rendah.
2. Kinerja P2 (Kompetensi), yakni kinerja yang fokus pada prestasi aksi tinggi, tetapi prestasi hasil rendah.
3. Kinerja P3 (Dampak), yakni kinerja yang fokus kepada prestasi aksi rendah sedangkan prestasi hasil tinggi.

4. Kinerja P4 (Produktivitas), yakni kinerja yang fokus pada prestasi aksi dan prestasi hasil yang sama – sama tinggi.

Indikator untuk menentukan tingginya prestasi aksi dan prestasi hasil sebagai berikut :

Prestasi Aksi :

- Beban kerja / permintaan
- Kualitas pelayanan
- Responsivitas
- Responsibilitas
- Akuntabilitas
- Daya Tanggap

Prestasi Hasil :

- Dapat diperbandingkan
- Dapat dikontrol
- Relevan
- Realistis dan Efisien
- Efektivitas
- Ekonomi

Kriteria pekerjaan atau dimensi yang spesifik dari kinerja pekerjaan akan mengidentifikasi elemen yang paling penting dalam pekerjaan tersebut (Rahadi, Dedi Rianto, 2010 : 9).

Menurut Bernardin dan Rusel (dalam Muhammad, Fadel, 2008 : 13), terdapat dua variasi konsep *performance* (kinerja) yaitu : kinerja dalam arti penampilan atau aksi, dan dalam bentuk hasil (*output*) atau hasil akhir (*outcome*) yang dicapai. Hasil yang dinilai tidak hanya dikaitkan dengan *input* waktu, namun juga dengan *input* biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, dalam pengukuran kinerja tidak hanya digunakan indikator efektivitas tetapi juga efisiensi.

Dalam perkembangannya, konsep kinerja memang dilihat secara variatif. Kinerja sebagai proses atau kegiatan menurut W.G Bennis (Muhammad, Fadel, 2008 : 14) yang mengatakan bahwa proses suatu organisasi memecahkan masalah. Berkaitan dengan pendapat tadi yaitu penjelasan yang dikemukakan oleh David A. Garvin (Muhammad, Fadel, 2008 : 14), bahwa keberhasilan organisasi sebaiknya dinilai dari tingkat kemampuan beradaptasi dan *fleksibilitas* daripada keuntungan yang diraih dan produktivitas.

Dalam Pemerintahan Daerah merupakan kinerja organisasi atau instansi pemerintahan daerah. Oleh karena itu, definisi kinerja organisasi dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kinerja organisasi pemerintah. Dalam beberapa literatur, kinerja organisasi diartikan sebagai

kemampuan organisasi untuk meraih tujuannya melalui pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif (Draft, 2002: 15).

Sedangkan menurut Callahan (Muhammad, Fadel, 2008: 14), kinerja organisasi menggambarkan sampai berapa jauh suatu organisasi mencapai hasil setelah dibandingkan dengan kinerja terdahulu (*previous performance*) dengan organisasi lain (*benchmarking*) dan sampai seberapa jauh meraih tujuan dan target yang telah ditetapkan. Oleh karena Pemerintahan Daerah tergolong dalam organisasi publik, maka kinerjanya dapat dinilai dari sampai seberapa jauh ia memenuhi tuntutan publik melalui pemberian *public goods*.

Ketika membicarakan indikator kinerja pemerintahan daerah, Fenwick (Muhammad, Fadel, 2008: 15), menggunakan tiga dimensi kinerja yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dimensi ekonomi adalah perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dan kualitas sumber daya yang diperoleh sebagai *input* dalam proses manajemen.

Dapat dikatakan semakin ekonomis, jika biaya yang dikeluarkan kecil sedangkan kualitas sumber daya yang diperoleh semakin baik, dan sebaliknya. Selanjutnya dimensi efisiensi adalah perbandingan antara sumber daya yang digunakan dan *output*. Artinya berapa *output* yang dihasilkan dalam proses bila dibandingkan dengan *input* yang masuk. Semakin besar *output* yang dihasilkan dan semakin kecil *input* yang masuk maka semakin efisien. Dalam dimensi ini sejauh mana *output* yang dihasilkan dapat memenuhi sasaran dan tujuan manajemen.

Meskipun Fenwick membedakan ukuran ekonomi dan efisiensi, namun kedua ukuran tersebut sering digabung menjadi efisiensi saja. Ukuran efektivitas hampir selalu digunakan untuk menggambarkan kesesuaian antara rencana dan realisasi. Sementara ukuran lain yang juga sering digunakan adalah relevansi, apakah suatu program yang diusulkan itu relevan dengan masalah yang hendak dipecahkan di masyarakat.

b. Pemerintah Desa

1. Pengertian

Menurut Widjaja (2003:3) desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal – usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 1, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat – istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tinjauan tentang Desa juga terdapat dalam Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 23, Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Meskipun peraturan secara umum menggunakan pendekatan administratif, namun pengertian dalam Undang – Undang tersebut merujuk pada definisi secara fungsional. Menurut PEMENDAGRI No. 35 Tahun 2007 penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koorsinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.

2. Struktur dan Fungsi Perangkat Desa

Pemerintahan Desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.

1. Menurut Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 48 perangkat desa terdiri dari :

a) Kepala Desa

Bertugas untuk menyelenggarakan pemerintah dan pemberdayaan desa.

Fungsi Kepala Desa diantaranya yaitu :

- Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana dan prasarana perdesaan.
- Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata cara pemerintahan, penetapan peraturan desa, melakukan upaya perlindungan masyarakat, mengatur administrasi kependudukan, dan penataan wilayah.

- Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.
- Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b) Sekretaris Desa

Tugas dari sekretaris desa adalah mendampingi pimpinan atau kepala desa untuk menjalankan segala macam tugasnya. Adapun fungsi yang lebih spesifik adalah :

- Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa di kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset dan pelayanan umum.
- Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventorisir data – data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

c) Pelaksana Teknis Desa

Dalam struktur perangkat desa terdapat kepala urusan yang secara umum membantu kepala desa dan sekretaris desa, terdiri dari :

- Kepala Urusan Keuangan (KAUR Keuangan),
Membantu sekretaris desa dalam hal mengatur administrasi keuangan baik itu pendapatan dan pengeluaran.
- Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM),
Membantu sekretaris desa dalam menginventaris kekayaan desa, mengelola arsip desa, menjadi penyedia perbaikan dan pemeliharaan peralatan kantor,dan lain sebagainya.
- Kepala Urusan Pembangunan (KAUR Pembangunan, memiliki tugas untuk menyiapkan teknis pengembangan ekonomi desa serta mengelola segala administrasi yang berhubungan dengan hal tersebut. Fungsinya adalah untuk melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan, mengelola tugas pembangunan, serta menyiapkan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat.
- Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM),

Tugasnya membantu kepala desa untuk mengelola administrasi dan perumusan bahan kebijakan desa. Sedangkan fungsinya yaitu lebih menitikberatkan pada pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, ketertiban masyarakat dan juga ketentraman.

- Kepala Urusan Kesejahteraan (KAUR KESRA), tugasnya membantu kepala desa mempersiapkan rumusan kebijakan peyusunan program yang berhubungan dengan keagamaan, pemberdayaan, dan juga sosial kemasyarakatan.

d) Pelaksanaan Kewilayahan

- Kepala Dusun (KADUS), tugas kepala dusun ini secara struktur langsung berhubungan dengan kepala desa karena kepala dusun ini nantinya akan membantu kepala desa untuk melaksanakan tugasnya di wilayah dusun.

Fungsi kepala dusun adalah :

- Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- Membina ketentraman dan ketertiban, melaksanakan perlindungan masyarakat, mencatat mobilitas kependudukan serta

mendatanya dengan tertib dan menata juga mengolala wilayah.

- Melakukan pemberdayaan masyarakat sesuai bidangnya dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

c. Pembangunan Desa

Menurut Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 78 ayat 1, 2 dan 3, pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong – royongan guna mewujudkan pengarustamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Menurut Siagian (2014:3) pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa / *national building*.

Sukirno (1985) menjelaskan tentang konsep pembangunan mempunyai tiga sifat penting, yaitu : proses terjadinya perubahan secara terus menerus, adanya usaha untuk menaikkan pendapatan per-kapita masyarakat dan kenaikan pendapatan masyarakat yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Perencanaan adalah seluruh kegiatan (*planning*) yang dilakukan sebelum melakukan suatu kegiatan, dari suatu program proyek, yakni menentukan tujuan objektif, tujuan antara, kebijakan, prosedur dan program.

Menurut Haeruman (1997) ada dua sisi pandang untuk menelaah pedesaan, yaitu :

- 1) Pembangunan pedesaan dipandang sebagai suatu proses alamiah yang bertumpu pada potensi yang dimiliki dan kemampuan masyarakat desa itu sendiri. Pendekatan ini meminimalkan campur tangan dari luar sehingga perubahan yang diharapkan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang.
- 2) Sisi yang lain memandang bahwa pembangunan pedesaan sebagai suatu interaksi antar potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa dan dorongan dari luar untuk mempercepat pembangunan pedesaan.

Target pembangunan desa yang objektif adalah pembangunan yang jelas dan nyata sehingga menjadikan masyarakat yang tinggal di pedesaan akan semakin nyaman dan tentram.

Program pembangunan desa misalnya adalah :

1. Pembangunan di bidang sarana dan prasarana
(Infrastruktur)

Pembangunan dibidang infrastruktur ini dimaksudkan untuk kelancaran segala bentuk aktifitas yang dilakukan oleh desa yang bersangkutan. Pembangunan infrastruktur di desa tersebut harus didasarkan atau ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga memungkinkan tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Di sisi lain infrastruktur yang dibangun juga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab dalam mengelola dan memelihara setelah proyek tersebut berakhir, dan di dalam membangun infrastruktur desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat sehingga sumber daya yang dimiliki oleh desa yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien (Suriadi, 2005 : 61).

2. Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan – kepentingan yang sama, perasaan memiliki, dan biasanya menempati satu tempat yang sama (Suriadi 2005 : 41).

Manusia tidak dapat hidup sendiri, tetapi harus hidup bersama atau berkelompok dengan manusia yang lain dalam hubungannya saling membantu untuk dapat mencapai tujuan hidup menurut kemampuan dan kebutuhannya masing – masing atau dengan istilah lain adalah saling berinteraksi.

d. Politik

Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu *Polis* atau negara kota. Politik dapat diartikan sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.

Ada beberapa unsur politik :

1. Negara (*State*)
2. Kekuasaan (*Power*)
3. Pengambilan Keputusan (*Decision Making*)
4. Kebijaksanaan (*Policy*)
5. Pembagian (*Distribution*) atau alokasi (*allocation*)

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini yaitu beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang dinilai relevan dengan apa yang akan peneliti saat ini kaji,

sehingga dapat menjadi salah satu referensi dalam penelitian yang saat ini sedang peneliti lakukan, diantaranya :

1. Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kuala Lapang dan Desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. Maya Rosalina, Program Studi Pemerintahan Integratif FISIP Universitas Mulawarman.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data model interaktif milik milles dan huberman. Hasil dari penelitian ini yaitu Kinerja Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Infrastruktur mengedepankan aspirasi rakyat, yang dapat dilihat dari produktivitas, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas pemerintahan desa.

2. Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur (Suatu Studi di Desa Pakure III Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan). Fandy V. Sagai, Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Sam Ratulangi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan gambaran secara penuh dan nyata di lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data dari wawancara. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah Desa Pakure III Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan sudah berperan dengan baik dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan.

3. Politik Pemerintahan Desa (Analisis Kinerja Pemerintahan Desa Tajurbuntu, Kec. Pancalang Kab. Kuningan dalam Pembangunan Desa 2009 - 2014). Azimat Maulana, Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Siliwangi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan data kuantitatif untuk mendapatkan gambaran sepenuhnya yang terjadi di lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner dan observasi langsung. Adapun dalam penelitian ini penulis ingin meneliti mengenai Politik Pemerintahan Desa dengan studi kasus kinerja pemerintahan desa tajurbuntu melalui konsep tipologi kinerja dalam pembangunan desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, penelitian ini melihat bagaimana pemerintahan Desa Tajurbuntu dalam pembangunan desa baik melalui sarana maupun melalui peningkatan Sumber Daya Manusia sebagai pengguna infrastruktur tersebut agar keberlangsungan dari infrastruktur dapat terjamin.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Subyek Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1	Maya Rosalina, Universitas Mulawarman Tahun 2013	Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Kuala Lapang dan Desa Taras Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau	Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis Kinerja Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Infrastruktur mengedepankan aspirasi rakyat, yang dapat dilihat dari produktivitas, responsivitas, tanggung jawab dan akuntabilitas pemerintahan desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data model interaktif milik milles dan huberman.	Perbedaan yang diteliti yaitu terletak pada fokus penelitian dan lokasi yang diteliti.	Persamaan penelitian terletak pada teknik analisis data model interaktif milik milles dan huberman.
2	Fandy V Sagai, Universitas Sam Ratulangi Tahun 2016	Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur (Suatu Studi di Desa Pakure III Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan).	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan gambaran secara penuh dan nyata di lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data dari wawancara. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah Desa Pakure III Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan sudah berperan dengan baik dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan.	Perbedaan pada penelitian terletak pada lokasi dan tahun penelitian. Hasil penelitian pun menunjukkan yang berbeda dari penelitian yang sebelumnya dimana dalam penelitian ini masyarakat merasa kurang puas terhadap kinerja pemerintahan desa.	Persamaan penelitian terletak pada metode penelitian yaitu kualitatif deskriptif.
3	Azimat Maulana, Universitas Siliwangi Tahun 2019	Politik Pemerintahan Desa (Analisis Kinerja Pemerintahan Desa Tajurbuntu, Kec. Pancalang Kab. Kuningan dalam Pembangunan Desa 2009 – 2014)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pemerintahan Desa Tajurbuntu Kab. Kuningan periode 2009 – 2014 dalam pembangunan desa dimana didalamnya mencakup pembangunan secara fisik yaitu infrastruktur dan non-fisik yaitu pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM). Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif menggunakan pendekatan studi kasus dan	Perbedaan penelitian ini dari penelitian di atas yaitu penelitian ini menggambarkan pembangunan desa secara lebih luas, tidak hanya pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus tetapi ada juga	

			menggunakan teknik analisis data model interaktif milik milles dan huberman. Penelitian yang dihasilkan dianalisis menggunakan empat tipologi kinerja.	pembangunan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM). Kemudian penelitian ini dibantu menggunakan data kuantitatif menggunakan kuesioner	
--	--	--	--	--	--

C. Kerangka Pemikiran

Memasuki era globalisasi desa mengalami banyak perubahan. Pada awalnya desa hanya diakui sebagai organisasi pemerintahan, tetapi pada masa sekarang desa diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangga pemerintahannya sendiri. Setelah adanya Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur jalannya pemerintahan sesuai dengan situasi dan kondisi desa tersebut agar dapat mengalami kemajuan dan tidak tertinggal dari wilayah perkotaan. Salah satu tugas pemerintahan desa yaitu untuk melakukan pembangunan desa.

Menurut Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 78 ayat 1 pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa dengan memanfaatkan potensi lokal desa. Pembangunan desa juga harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong – royongan guna mewujudkan keharmonisan dan kemajuan desa.

Untuk mempermudah dalam melihat dari langkah yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini, maka peneliti membuat kerangka pemikiran.

Kerangka pemikiran sebagai berikut :

